

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penggunaan nuklir untuk menjadi senjata telah lama menjadi perhatian masyarakat dunia internasional. Hal ini telah terjadi saat Perang Dunia Kedua penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat yang menggunakan bom atom untuk menyerang Jepang. Selain itu dengan penggunaan senjata nuklir oleh Amerika Serikat pada saat Perang Korea dalam menghadapi Korea Utara. Hal ini membuat Korea Utara juga ingin mengembangkan senjata nuklir, nuklir dianggap sebagai senjata yang ampuh untuk melindungi serta mencegah dari intervensi dari negara lain. Korea Utara yang mengembangkan nuklir untuk menjadi persenjataan banyak ditentang oleh komunitas internasional, karena Korea Utara secara terang-terangan menyatakan tujuan pengembangan nuklir selain untuk melindungi negaranya tapi juga dipersiapkan untuk mengancam negara lain. hal ini tentunya mengancam stabilitas keamanan internasional, tekhusus bagi Korea Selatan sebagai negara terdekat dan telah lama menjadi rival pasca pecahnya Semenanjung Korea.

Korea Selatan sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh dalam komunitas internasional telah lama telah lama merespon setiap aktivitas nuklir dari Korea Utara, tepatnya sejak Korea Selatan mulai dipimpin oleh pemerintahan sipil pada tahun 1993 hingga saat sekarang. Korea Selatan telah banyak melakukan upaya-upaya diplomatis seperti dialog dan negosiasi terhadap Korea Utara untuk memperbaiki hubungan kedua negara dan bisa mempengaruhi Korea Utara agar mau menghentikan program proliferasi

nuklirnya. Naiknya turun tensi hubungan kedua negara yang diakibatkan bergantinya rezim kepemimpinan Korea Selatan dengan gaya kebijakan yang berbeda-beda. Di mana hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat agresivitas Korea Utara dalam mengembangkan nuklir untuk menjadi persenjataan.

Berdasarkan kondisi hubungan kedua negara yang mengalami naik turun, Korea Selatan yang dipimpin oleh Park Geun-Hye yang resmi menjadi presiden pada tahun 2013 berusaha menerapkan kebijakan baru yaitu *Trust-Politik*. Melalui kebijakan ini Park ingin bisa menurunkan agresivitas nuklir dan mewujudkan perbaikan hubungan dengan Korea Utara. Park menyatakan kebijakan ini sebagai kolaborasi dari kebijakan-kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang sudah ada sebelumnya, di mana dalam konsep ini Park lebih menekankan konsep *trust* dalam setiap proses yang akan dilaksanakan.

Untuk melihat mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan luar negeri *Trust-Politik* sebagai upaya untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara, di sini peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dengan melihat pola perilaku negara. Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri *Trust-Politik* sebagai upaya untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara.

Unsur pertama yaitu *threats* (ancaman), ancaman memiliki pengaruh terhadap kebijakan Korea Selatan dilihat dari ancaman proliferasi nuklir dan tindakan-tindakan provokasi dari Korea Utara. Kedua, *interest* (kepentingan)

terlihat pada kebutuhan dasar negara untuk menjaga kelangsungan hidup negara, peningkatan ekonomi dan penerapan nilai-nilai demokrasi oleh Korea Selatan. Ketiga, *capabilities* (kemampuan) terlihat pada dengan kemampuan Korea Selatan yang sudah cukup maju secara ekonomi, militer, politik, dan sosial kebudayaan, sehingga membuat Korea Selatan harus memainkan peranannya dalam dunia internasional untuk menjaga keamanan internasional khususnya di Semenanjung Korea. Keempat, *opportunities* (peluang) terlihat pada bagaimana Korea Selatan berupaya melakukan diplomasi untuk membangun kerjasama ekonomi dan harapan mengembangkan serta integrasi ekonomi di Semenanjung Korea. Terakhir, yaitu *objectives* (tujuan) yang merupakan tujuan akhir dari kebijakan *Trust-Politik* yaitu untuk menjaga pertahanan dan keamanan agar bisa menjaga kelangsungan hidup negaranya (*survival*), mewujudkan kondisi yang aman dan damai serta bisa mengembangkan kerja sama ekonomi di Semenanjung Korea.

5.2 Saran

Pengembangan nuklir serta tindakan provokasi dari Korea Utara merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dan melanggar norma-norma internasional. Korea Selatan sebagai negara terdekat harusnya bisa membujuk Korea Utara agar mau menghentikan pengembangan nuklir dan tindakan-tindakan provokasi yang mengancam keamanan internasional. Kebijakan *Trust-Politik* yang diterapkan oleh Korea Selatan yang terdiri atas tiga kerangka besar seharusnya bisa menetapkan kebijakan khusus terhadap Korea Utara tanpa menggabungkan dengan kerangka kebijakan lainnya. Hal ini sama dengan era

kepemimpinan Roh Myu-hun, di mana Roh yang melanjutkan kebijakan era Kim Dae-jung mengalami penurunan hubungan dengan Korea Utara. hal ini disebabkan karena Roh menggabungkan kebijakan Korea Utara dan kebijakan lainnya dalam satu rumusan kebijakan sehingga kebijakan dengan Korea Utara menjadi tidak efektif.

